

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2006. *Sosiologi Konflik Agraria : Protes-Protes Agraria Didalam Masyarakat Indonesia Kontenporer*. Padang : Andalas University Press.
- Afrizal, 2014. *Metode penelitian kualitatif : suatu upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Bachriadi, D. 2002. *Warisan Kolonial yang Tidak Diselesaikan : Konflik dan Pendudukan Tanah di Tapos dan Badega, Jawa Barat*. Yogyakarta : Insist Press : Yogyakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Fauzi, N. 1998. *Anatomi Sengketa Tanah Orde Baru :Kasus-Kasus Sengketa pertanahan Sepanjang Orde Baru*. Yayasan Sinesta & Serikat Petani Sumatera Utara : Medan.
- Jusmar, A.A., dkk. 2017. *Buku Informasi :Kawasan Konservasi Balai KSDA Sumatera Barat*. Padang : DIPA BALAI KSDA.
- Loetsch, F dab K.F Haller. 1964. *Forest Inventory*. BLV Verlagsgesellschaft. Munchen.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Priyono. 2002. *Anthony Gidden: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ribot JC, Peluso NL. 2003. *A Theory of Access*. Rural sociology 68 (2). The Rural Sociological Society. Pp 153-181.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar (Edisi 4)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendang, Endang. 2013. *Pengantar Ilmu Kehutanan*. Bogor : PT Penerbit IPB Press.

Yusuf, Afdul Muis dan Makarao, Muhamad Taufik. 201. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*. Jakarta : Rieneka Cipta.

Undang-Undang Dasar dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1990. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999. Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2007. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 28 tahun 2015. Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Sepadan Danau.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 tahun 1990. Pengelolaan Kawasan Lindung.

Peraturan Daerah Tanah Datar No. 2 tahun 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011-2031.

Skripsi /Tesis/Disertasi :

Sahnan.dkk. 2016. "*Sengketa Pemanfaatan Tanah Kawasan Hutan Antara Warga Masyarakat dengan Dinas Kehutanan*", Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Susilowati. 2015. "*Konflik Tenurial dan Sengketa Tanah Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Perum Perhutani*", Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Ratna Rahman, "*Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)*", Jurusan Sosiologi Agama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UIN Alaudin Makasar.

Reksohadiprojo, 2000. *Kajian Identifikasi Potensi dan Permasalahan Hutan Kemasyarakatan Di Desa Soakonora Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara*. Dalam Skripsi Ridwan Din, Universitas Nuku.

Internet

[Http://Ksdae.menlhk.go.id/perizinan/7/ijin-pengusahaan-pariwisata-alam-\(ippa\).html](http://Ksdae.menlhk.go.id/perizinan/7/ijin-pengusahaan-pariwisata-alam-(ippa).html).

Diakses pada 20 Desember 2019.

File.upi.edu > Direktori > FPIPSPDF “Wisata alam atau pariwisata ekologis adalah perjalanan ketempat-tempat ... Diakses pada 10 Januari 2020.

